

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate

IKATA PIENGANTAUR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) Tahun 2020 – 2024 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis SKIPM Ternate Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan bagi segenap jajaran SKIPM Ternate dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan SKIPM Ternate Tahun 2020-2024.

Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dokumen rencana strategis SKIPM Ternate dapat tersusun. Semoga Renstra SKIPM Ternate ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan visi dan misi SKIPM Ternate.

Ternate, 27 Januari 2023

Kepala,

TERNATE STATE OF THE STATE OF T

Arsal, S.St.Pi. M.P

NIP. 19810520 200312 1 005

IDAJFTAJR ISI

KATA PENGANTAR	ı
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	٧
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKIPM TERNATE	Vi
BABI. PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Kondisi Umum	3
C. Potensi	8
D. Permasalahan	9
E. Lingkungan Strategis	10
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	20
A. Visi	21
B. Misi	21
C. Tujuan	21
D. Sasaran Strategis	22
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	24
A. Arah Kebijakan dan Strategi	24
B. Kerangka Regulasi	26
C. Kerangka Kelembagaan	26
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	31
A. Target Kinerja	31
B. Kerangka Pendanaan	31
BAB V. PENUTUP	32
I AMPIRAN	33



Tabel 1.1.	Latar Belakang Pendidikan Pegawai SKIPM Ternate	6
Tabel 1.2.	Jabatan Fungsional SKIPM Ternate Tahun 2023	7
Tabel 2.1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM	
	TERNATE 2023	26





Gambar 2.1. Peta Strategi SKIPM TERNATE Tahun 2020 - 2024......21





Lampiran 1. Rencana Strategis Pembangunan SKIPM Ternate Tahun	
2020 – 2024	35





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE

KOMPLEKS BANDARA SULTAN BABULLAH TERNATE - 97728 TELEPON/ FAKSIMILE (0921) 3126148 POS ELEKTRONIK : ski_babullah@yahoo:co.id

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE (SKIPM TERNATE)

Nomor: KEP. /42.0/RC.210/II/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE TAHUN 2020 - 2024

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate tahun 2020-2024 dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N0mor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Nasional Tahun Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154)
- 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 111);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1):
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
- 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN- KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE TAHUN 2020-2024.



Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Stasiun ini yang dimaksud dengan :

- Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKIPM Ternate merupakan Unit Pelaksana Teknis KIPM di bidang pelayanan operasional karantina ikan,pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 - 2024, yang selanjutnya disebut Renstra SKIPM Ternateadalah dokumen perencanaan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 3. Kepala Stasiun adalah Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate

Pasal 2

- (1) Menetapkan Renstra SKIPM Ternate Tahun 2020-2024, yang merupakan pedoman bagi pegawai Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate dalam penyusunan rencana kerja (renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024.
- (2) Renstra SKIPM Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun ini;

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra SKIPM Ternate,

Meliputi:

- 1. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan dan lingkungan strategis;
- 2. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
- 3. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
- 4. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- 5. Penutup.



Pasal 4

Kepala Stasiun melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra SKIPM Ternate.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 18 Februari 2022

AUTA Kepala

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

NIP. 19810520 200312 1 005



A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. BKIPM mengemban tugas melaksanakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung visi pemerintah adalah "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yaitu Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability), dan Kesejahteraan (Prosperity).

BKIPM merupakan salah satu Eselon I KKP yang termasuk ke dalam Pilar Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BKIPM, maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP adalah "dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam membangun komunikasi dengan para stakeholders, pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang semakin kondusif".



Tujuan pembangunan BKIPM untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu dengan mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan. mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu BKIPM dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama



penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.25/MEN/2011, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang dituntut untuk mendukung program peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya. SKIPM Ternate harus terus menerus melakukan perubahan ke arah penyempurnaan dan pengembangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh BKIPM.

SKIPM Ternate telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) tahun 2020 – 2024 sebagai pedoman bagi pegawai SKIPM Ternate dalam menyusun rencana pembangunan SKIPM Ternate Tahun Anggaran 2020-2024.

B. KONDISI UMUM

1. Sarana dan Prasarana Lainnya

.Sampai tahun 2020 SKIPM Ternate memiliki wilayah kerja di 5 (lima) Kabupaten Kota Propinsi Maluku Utara yaitu; Wilker Pel. Laut A. Yani, Wilker Bacan, Wilker Tobelo, Wilker Sanana, Wilker Morotai dan telah memiliki fasilitas sarana dan prasarana berupa tanah, gedung kantor Satker ,gedung wilayah Kerja dan sarana laboratorium. Gedung kantor merupakan gedung kantor Gedung kantor dilengkapi oleh ruang kepala, ruang staf, pelayanan, ruang rapat, ruang server, perpustakaan, dormitori, dapur dan mushola.

Laboratorium basah dengan luas 1.000 M2 yang dilengkapi dengan rumah jaga yang berada terpisah dengan bangunan kantor utama.

Gedung laboratorium terdiri dari 6 (lima) ruang laboratorium, , ruang persiapan, ruang bahan , Ruang parasit dan nekropsi,



Laboratorium uji Bakteri, laboratorium Virus, dan Laboratorium Organoleptik.

Peralatan laboratorium yang telah dimiliki SKIPM Ternate di antaranya Real Time PCR, Laminari Airflow Vertical, Automatic Tissue Processor, Freeze



Dryer, Laminar Air Flow, DNA Sequencer, Deep Freezer, , Shaking Incubator, Sarana pendukung lainnya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKIPM Ternate, di antaranya kendaraan roda 2 dan roda 4, alat pengolah data, alat studio dan komunikasi, perlengkapan sarana gedung kantor lainnya.

2. Kemampuan Diagnosis HPIK, Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan

Menurut tingkat kemampuan melakukan diagnosis penyakit, laboratorium SKIPM Ternate merupakan salah satu laboratorium karantina ikan yang diklasifikasikan sebagai Laboratorium Level III yaitu Laboratorium karantina ikan dengan kemampuan melakukan diagnosis berbagai hama dan penyakit ikan karantina yang disebabkan oleh parasit, jamur, bakteri dan virus. Laboratorium SKIPM Ternate melakukan pengujian HPI/HPIK dengan menggunakan metode konvensional, molekuler, dan PCR Selain itu, SKIPM Ternate dapat melakukan pengujian Organoleptik.

Laboratorium SKIPM Ternate juga mempunyai kemampuan untuk melakukan uji mutu dan keamanan hasil perikanan. Parameter yang dapat diuji diantaranya, bakteri mutu (*E. coli, Salmonella*, ALT, *Vibrio sp*).

3. Akreditasi

a. Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008

Pada tahun 2018 ditetapkan dan di perbaharui tanggal 14 Januari 2020 dengan nomor LP-840-IDN(Amd) Laboratorium SKIPM Ternate telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)untuk 4 (empat) parameter yaitu *parasite Oktolasmis,dan Bakteri Vibrio SP*. Tahun Sampai dengan tahun 2020, laboratorium SKIPM Ternatetelah menambah ruang lingkup paramater uji menjadi 4 parameter, terdiri dari 1 parameter uji HPI/HPIK dan 3 parameter uji mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Parameter HPI/HPIK: VNN
- 2) Parameter mutu dan KHP: ALT, Salmonella sp., Escherichia coli.



b. Sertifikasi ISO 9001:2008

Pada tahun 2016, Unit Pelaksana Teknis KIPM, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. Standar Ini membantu organisasi untuk menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebuah versi baru dari standar dan berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 9001 2008 dari Lembaga Sertifikasi Internasional (QAI) pada tanggal 30 Mei 2016.

c. Akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012

Pada bulan Oktober 2019, Unit Pelaksana Teknis KIPM, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate berhasil mendapatkan Sertifikat ISO SNI ISO/IEC 17020:2012 sebagai Lembaga Inspeksi

-Tipe A. yang di diasesmen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). ISO SNI ISO/IEC 17020:2012 sistem manajemen mutu jasa inspeksi berstandar internasional. ISO 17020 merupakan standar sistem mutu yang spesifik untuk organisasi yang bergerak dalam jasa inspeksi untuk spesifikasi pekerjaan yang legal dan valid. Dengan demikian, pengakuan atas spesifikasi dapat dipertanggung jawabkan, baik secara ilmiah maupun hokum.

4. Pelayanan Sertifikasi

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing- masing negara, termasuk negara mitra dagang, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health, quality and safety assurance) yang mengacu pada konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (traceability) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana



Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 bahwa pengembangan sistem Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Serta Pengendalian Keamanan Hayati Ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui:

- (a) Penguatan sistem karantina ikan,
- (b) pembangunan di wilayah perbatasan,
- (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan,
- (d) Pengendalian agen hayati,
- (e) Standarisasi dan kepatuhan.

5. Jumlah dan Pelatihan SDM

Sumber daya manusia pada SKIPM Ternate sampai dengan 2023 berjumlah 31(tiga puluh Tiga) orang, terdiri dari 20 (dua puluh) orang PNS dan 13 (sebelas) orang tenaga kontrak. Tenaga teknis berjumlah 20 (dua puluh satu) orang, tenaga administrasi berjumlah 6 (enam) orang dan pejabat struktural berjumlah 2 (dua) orang.

Tabel 1.1. Latar Belakang Pendidikan Pegawai SKIPM Ternate

No.	Jenjang Pendidikan	Struktural	Teknis	Administrasi	Tenaga Kontrak	Total
1	S2	2	1			3
2	S1/D4		8	1	6	15
3	D3		4			4
4	SLTA		4		6	10
5	SLTP				1	1
6	SD					



Pegawai SKIPM Ternate terdiri dari pejabat fungsional dan non fungsional. Jabatan fungsional yang ada di SKIPM Ternate yaitu Pengendali HPI (PHPI), Pranata Komputer dan Arsiparis.

Tabel 1.2. Jabatan Fungsional SKIPM Ternate Tahun 2023

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah	
1	PHPI Ahli Madya	-	Orang
2	PHPI Ahli Muda	3	Orang
3	PHPI Ahli Pertama	1	Orang
4	PHPI Terampil Pelaksana Lanjutan	3	Orang
5	PHPI Terampil Pelaksana	4	Orang
6	Calon PHPI Ahli	1	Orang
7	PHPI Pemula	1	Orang
8	Calon Pengawas Perikanan Muda	1	Orang
9	Calon Pengawas Perikanan Ahli Pertama	1	Orang
10	Calon Pengawas Perikanan Terampil	1	Orang
11	Pranata Komputer Ahli	1	Orang
12	APKAPBN	-	Orang
12	Pranata Komputer Terampil	-	Orang
13	Arsiparis Terampil	-	Orang

Pejabat Fungsional dan tenaga teknis SKIPM Ternate telah mengikuti pelatihan teknis meliputi Pelatihan Dasar Karantina Ikan. Selanjutnya, Pelatihan Parasitologi, Bakteriologi, Virologi, , Sistem Mutu Laboratorium Penguji (SNI ISO/IEC 17025:2017), Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2017, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 dan pelatihan teknis lainnya.

Dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan teknis tersebut, SKIPM Ternate menunggu pengusulan peserta dari pusat BKIPM pelatihan teknis dan pelatihan lainya yang diselenggarakan oleh institusi dalam negeri.



Untuk pegawai administrasi, sebagian juga telah mengikuti Pelatihan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, dan Informasi yang diadakan oleh BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Instansi Lainnya.

C. POTENSI

Maluku Utara sebagai salah satu propinsi kepulauan yang memiliki banyak pulau dengan luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang. Dibandingkan dengan potensi daerah lainnya, Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan sangat menjanjikan di masa depan. Dengan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dapat mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar area di dalam wilayah Negara Indonesia maupun antar negara. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu Stasiun-KIPM Ternate dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar terhadap tuntutan perlunya layanan prima dan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, SKIPM Ternate ke depan menghadapi banyak tantangan dan ancaman. Untuk itu dalam perencanaan pembangunan SKIPM Ternate diperlukan analisa lingkungan strategis internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan maupun analisa lingkungan ekternal yang meliputi tantangan dan ancaman yang terkini. Adapun potensi dan faktor kunci keberhasilan pembangunan SKIPM Ternateadalah sebagai berikut:

- a. Dukungan SDM SKIPM Ternate yang kompeten dan profesional.
- b. Dukungan sarana dan prasarana yang mendukung pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar



internasional.

- c. Penguasaan teknik dan metode pengujian HPI/HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar internasional.
- d. Kelembagaan SKIPM Ternate yang tertata dengan optimal dan kuat.
- e. Peningkatan hubungan kerjasama baik di dalam Kementerian Kelautan danPerikanan, antar Kementerian maupun Regional
- f. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peranan karantina ikan,pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

D. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM Ternate sebagai UPT pelayanan Operasiona Karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di daerah masih mengalami beberapa permasalahan:

- 1. Dengan meningkatnya beban kerja SKIPM Ternate sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang dituntut untuk mendukung program peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya. melihat kondisi saat ini terutama di bidang pelayanan dan pengawasan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan, SKIPM Ternatemasih memerlukan tambahan sumberdaya manusia untuk mendukung kegiatan pengujian di laboratorium, Pengawasa dan Administrasi.
- 2. Sarana dan prasarana laboratorium masih harus dikembangkan yang diperuntukkan kegiatan pengujian rutin sesuai standar.
- 3. Sosialisasi tentang keberadaan SKIPM Ternate masih belum maksimal menjangkau berbagai pihak terkait maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang tugas dan fungsi serta keberadaan SKIPM ternate.
- SKIPM Ternate masih kurang dalam kerjasama laboratorium di tingkat regional



E. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Lingkungan Strategis Internal

a. Kekuatan

- Sumberdaya Manusia SKIPM Ternte telah memiliki kompetensi dalam pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Sarana dan prasarana SKIPM Ternte telah memadai untuk Pelayanan,Pengawasan dan pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Laboratorium SKIPM Ternte telah terakreditasi SNI ISO/IEC17025:2008 sejak tahun 2013;
- 4) SKIPM Terante telah tersertifikasi ISO 9001:2008 sejak tahun 2013;
- 5) SKIPM Terante telah tersertifikasi ISO17020:2012 sejak tahun 2019:

b. Kelemahan

- SDM SKIPM Ternate yang mempunyai latar belakang pengendalian mutu hasil perikanan masih kurang mencukupi.
- Sarana dan prasarana laboratorium masih harus dikembangkan yangdiperuntukkan kegiatan pelatihan teknis.
- Sosialisasi tentang keberadaan SKIPM Ternate masih belum maksima Imenjangkau berbagai pihak terkait maupun masyarakat.

2. Lingkungan Strategis Eksternal

a. Peluang

- Globalisasi perdagangan memberi konsekuensi peningkatan peran SKIPM Ternate sebagai UPT bidang pelayanan sertifikasi,Pengawasan dan Pengujian karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak di internal/pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara.
- 3) Kesempatan mengikuti pendidikan berupa izin belajar

b. Tantangan

1) Persaingan produk perikanan di pasar global yang menuntut jaminan



- kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
- 2) Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata berdampak pada peningkatan kegiatan lalulintas komoditas perikanan sehingga memberi konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya HPIK/HPI berbahaya serta masuknya produk hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu ke dalam dari suatu area ke area lain di wilayah Maluku Utara.
- Kemajuan dalam bidang bioteknologi memerlukan pengembangan teknik dan metode serta penyempurnaan standardisasi metode pengujian penyakit ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- 4) Tuntutan konsumen terhadap kualitas komoditas perikanan berimbas pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Selaras dengan visi pembangunan nasional serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia maka Visi KKP adalah "mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasisi kepentingan nasional".

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BKIPM, maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, maka Visi pembangunan BKIPM adalah "Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya", dengan misi yang diemban yaitu (1) mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan, (2) mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi, dan (3) mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju dan mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit ikan.

SKIPM Ternate sebagai UPT KIPM yang mempunyai peran sebagai UPT di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dituntut dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan untuk mewujudkan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.



Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi pembangunan BKIPM serta sesuai dengan fungsi dan peran SKIPM Ternate dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan maka visi dan misi SKIPM Ternate tahun 2020

– 2024 sebagai berikut :

A. VISI

Dalam rangka menyatukan arah dan mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan optimal, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM Ternate) yang berlokasi di Ternate, Provinsi Maluku Utara perlu merumuskan visi yang ingin dicapai.

Sebagai salah satu UPT KIPM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Visi pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate Tahun 2020-2024 Yaitu "Mewujudkan Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya".

B. MISI

Mengacu pada tugas dan fungsi yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada SKIPM Ternate serta dalam upaya mewujudkan visi SKIPM Ternate, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate menetapkan misi: "Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya".

C. TUJUAN

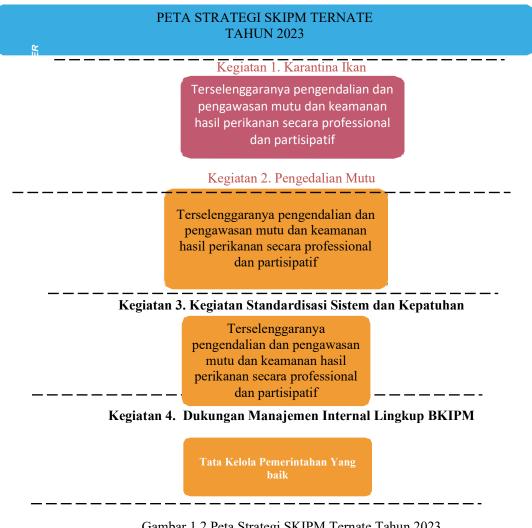
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024 adalah "Meningkatkan teknik dan metode pengujian



HPI/HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar nasional dan internasional".

D. SASARAN STRATEGIS

Strategis pembangunan Sasaran Stasiun Karantina Ikan. Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh SKIPM Ternate sebagai suatu outcome/impact dari beberapa output yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, SKIPM Ternate menggunakan pendekatan Balance Scorecard (BSC) yang dibagi dalam dalam empat perspektif, yakni stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:



Gambar 1.2 Peta Strategi SKIPM Ternate Tahun 2023



Gambar 1.1. Peta Strategi SKIPM Ternate Tahun 2020 - 2024

Si	ASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
Kegiata	an 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem	gendalian dan 01.1 yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup SKIPM			
	perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	01.2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM ternate	100	
		01.3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup SKIPM Ternate	4	
		01.4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa	1	
		01.5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup SKIPM Ternate	90	
		01.6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup SKIPM Ternate	2	
		01.7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup SKIPM Ternate	92	
		01.8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Ternate	2	
Kegiata	an 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan	02.1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate	5	
	pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara	02.2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup SKIPM TERNATE	3	
	professional dan partisipatif	02.3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM TERNATE	20	
		02.4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Ternate	8	

Kegiata	Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan	03.1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate	84			
	pengawasan sistem perkarantinaan, mutu	03.2	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup SKIPM Ternate	72			



	i .			
	dan keamanan hasil perikanan secara professional dan	03.3	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup SKIPM Ternate	1
	partisipatif	15	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90
Kegiata				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	04.1	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	84
	oaik iiiigkup BKII ivi	04.2	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Ternate	85
		04.3	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)	≤0.5
		04.4	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)	75
		04.5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	89
		04.6	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	86
		04.7	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)	77.5
		04.8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)	77.5



Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Ternate 2020-2024





A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati sebagai pedoman agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam kaitan tersebut kebijakan yang ditempuh oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

- 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif:
 - a. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup SKIPM Ternate
 - b. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM ternate
 - c. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup SKIPM Ternate
 - d. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa
 - e. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup SKIPM Ternate
 - f. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup SKIPM Ternate
 - g. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Ternate
 - 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
 - a. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate
 - b. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup SKIPM TERNATE
 - c. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM TERNATE
 - d. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Ternate
 - 3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan



keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

- a. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate
- b. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup SKIPM Ternate
- Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup SKIPM Ternate
- 4. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
 - a. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (Indeks)
 - b. Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Ternate
 - c. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)
 - d. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)
 - e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (Nilai)
 - f. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (Nilai)
 - g. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)
 - h. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)

B. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020- 2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam tatanan praktis kerangka regulasi akan meliputi pengaturan teknis pada sistem kerja yang mencakup penataan SDM, penyediaan SOP tata laksana pelayanan umum dan khusus.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, , Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (



SKIPM Ternate) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang dituntut untuk mendukung program peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya. SKIPM Ternate berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

SKIPM Ternate mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengawasan,Pelayanan,pengujian dan sertifikasi sesuai SOP Badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Ternate menyelenggarakan fungsi:

- 1. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dankeamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- 2. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dankeamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- 4. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan karantina Ikan,pengenalian Mutu dan kemanan HAsil Perikanan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka BKIPM didukung oleh:

- 1. Kepala Urusan Umum;
- 2. Koordinator Tata Pelyanan
- 3. Koordinator WASDALIN
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permen Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengenalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, UPT BKIPM terdiri atas :



- 1. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dankeamanan hasil perikanan; dan
- 2. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dankeamanan hasil perikanan.

Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan

keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

UPT BKIPM bidang pelayanan operasional mengemban fungsi antara lain :

- Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesiayang dipersyaratkan Negara tujuan;
- 3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- 4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan
- 5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 6. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan programmanajemen mutu terpadu,
- 7. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 8. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 10. Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- 11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- 12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasilperikanan; dan
- 13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.





A. TARGET KINERJA Indikator Kinerja

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024 dalam Struktur Manajemen Kinerja di SKIPM Ternate merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/ L setingkat Eselon VI, sebagaimana Lampiran 2.

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan SKIPM Ternate, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan PNBP). Pendanaan APBN dan PNBP KKP akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk kesejehteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan SKIPM Ternate Tahun 2020 – 2024 sebagaimana Lampiran 3.





Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM Ternate) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang dituntut untuk mendukung program peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya. Oleh karena itu visi dan misi serta langkah strategis kebijakan pembangunan SKIPM Ternate harus seirama, serasi dan harmonis dengan kebijakan pembangunan BKIPM dan KKP.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah menetapkan rencana strategis untuk tahun 2020-2024 sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan hasil yang ingin dicapai yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Laboratorium Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate telah ditetapkan sebagai laboratorium acuan bidang karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan SKIPM Ternate diarahkan untuk mendukung SKIPM Ternate sebagai Unit Pelaksana Teknis yang profesional.

Dalam mewujudkan SKIPM Ternate yang profesional sesuai Visi SKIPM Ternate memerlukan rencana strategis yang komprehensif meliputi (1) sistem dan manajemen laboratorium standar internasional sebagai landasan menjalankan organisasi yang efektif dan efisien, (2) profesionalisme sumberdaya manusia SKIPM TERNATEuntuk menjawab tuntutan daya saing dengan negara maju dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang cukup, (3) metode pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar nasional dan internasional.



Lampiran 1. Rencana Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM 2020-2024

	SASARAN STRATEGIS/INDIKAT OR KINERJA		INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
Ke	giatan 1. Karantina Ikan							
pengendalian o	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	98%	98%	99%	99%	99%
	keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	2	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (lokasi)	5	5	5	5	5
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	. 90	90	90	90	90
		4	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (lokasi)	2	2	2	2	2
		5	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)		100	100	100	100
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	92	92	92	92	92
		7	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Unit)	1	4	4	4	4
Ke	giatan 2. Pengendalian Mutu							

2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan	8	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5	5	5	5	5
	keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	4	4	4	4	4
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Produk)	20	20	20	20	20
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)		9	9	9	9
Ke	giatan 3. Kegiatan Standardis	asi Si	stem dan Kepatuhan					
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate (nilai)		84	84	84	84
	keamanan hasil perikanan secara professional dan	13	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)		70	70	70	70
	partisipatif	14	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (parameter)	3	3	3	3	3
		15	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	90	90	90	90
Ke	giatan 4. Dukungan Manajen	nen Ir	nternal Lingkup BKIPM					
4	<u> </u>	15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (Indeks)		83	83	83	83
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Ternate	85	85	85	85	85

17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)		≤1	≤1	≤1	≤1
18	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)	70	70	70	70	70
19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (Nilai)		89	89	89	89
20	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (Nilai)		81	81	81	81
2′	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)		75	75	75	75
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Ternate (%)		75	75	75	75

